



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : RSUD KOTA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIYANTA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 888943

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **450.148.000**

1. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 872114 m2/114 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 70.548.000
3. Tanah Seluas 1375 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 21.000.000
7. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 28.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **6.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA C Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **26.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.710.975
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	484.658.975
III. HUTANG	Rp.	182.440.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	302.218.575

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.